

PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* UNTUK MENGURANGI DAMPAK ABRASI

Raden Imam Al Hafis¹, Data Wardana², Sulis Setiawati³, Adrian Ilham Putra⁴
Universitas Islam Riau^{1,2,3,4}
imamalhafis@soc.uir.ac.id¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses *collaborative governance* untuk mengurangi dampak abrasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kepentingan yang berbeda pada setiap *stakeholder* dalam penanganan abrasi, koordinasi dilaksanakan pada saat kegiatan penanganan berlangsung bukan pada tahapan *face to face dialogue*, kesiapan dalam aspek finansial yang kurang memadai dari daerah dalam penanganan abrasi, pemanfaatan teknologi yang masih belum memadai baik sebelum maupun sesudah abrasi, serta adanya dominasi *stakeholder* yakni masyarakat yang lebih dominan dalam penanganan karena adanya dampak langsung yang dirasakan oleh warga. Simpulan penelitian yaitu perlunya keterlibatan aktif baik dari Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat terdampak, sektor swasta, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah untuk mengurangi dampak abrasi.

Kata Kunci: Abrasi, Berkelanjutan, *Collaborative, Governance*.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the collaborative governance process to reduce the impact of abrasion. This research method uses a qualitative approach. The results of the research show that there are different interests for each stakeholder in handling abrasion, coordination is carried out when handling activities are taking place, not at the face-to-face dialogue stage, preparedness in financial aspects is inadequate from the region in handling abrasion, the use of technology is still inadequate. before and after abrasion, as well as the dominance of stakeholders, namely the community who is more dominant in handling because of the direct impact felt by residents. The research concludes that there is a need for the active involvement of both Colleges, Swadaya Public Institutions, affected communities, the private sector, the Environmental Services (DLH), Public Works and People's Housing (PUPR), as well as the Government to reduce the impact of abrasion.

Keywords: Abrasion, Collaborative, Governance, Sustainable.

PENDAHULUAN

Salah satu proses alami yang sering terjadi di pesisir pantai adalah abrasi, proses ini merupakan aktivitas ombak dan arus laut yang kuat sehingga membuat pantai maupun tebing batu tererosi atau terkikis. Proses abrasi dimulai saat ombak menghantam tebing maupun pantai dengan kekuatan penuh serta energi yang tinggi. Ombak tersebut selanjutnya dapat mengikis pantai dengan mengangkut dan menggerakkan material seperti kerikil, pasir, dan batuan ke arah daratan (Istijono, 2018). Secara bertahap, proses yang berulang-ulang ini menyebabkan penipisan dan erosi pantai, serta merusak ekosistem pesisir yang sensitif (Istijono, 2018; Fajrin, 2016; Purwanto, 2016). Abrasi berdampak negatif baik pada lingkungan, pemukiman, maupun infrastruktur yang berlokasi di sekitar pesisir. Selain itu, abrasi juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem pesisir, menurunnya kualitas air, hilangnya tanah, sampai pada ancaman bagi keberlanjutan wilayah pesisir (Istijono, 2018; Fajrin, 2016; Hamsah, 2022; Ervianto, 2021). Dampak lain abrasi juga berpotensi menyebabkan kerugian pada bidang perekonomian yang signifikan, terutama pada sektor perikanan maupun pariwisata yang memiliki ketergantungan pada keberadaan lingkungan laut yang kaya serta pantai yang indah (Istijono, 2018)

Beberapa faktor yang menyebabkan abrasi diantaranya faktor alam yaitu perubahan alamiah kondisi pesisir maupun peningkatan tingkat permukaan air laut akibat perubahan iklim serta pemanasan global. Faktor aktifitas manusia yang tidak terkendali seperti kegiatan reklamasi pantai, pembangunan pelabuhan, penebangan pohon mangrove di pinggir pantai serta penambangan pasir (Cahyati, 2020). Pada beberapa kejadian, penebangan hutan di hulu sungai juga mempengaruhi tingkat sedimentasi serta

mengintensifikasi proses abrasi. Beberapa paparan mengenai abrasi yang dimulai dari proses, dampak negatif serta faktor penyebab terjadinya abrasi maka penanganan dalam mengatasi abrasi yang bersifat terpadu serta berkelanjutan sangat diperlukan. Selain menjaga pantai dan ekosistem pesisir, penanganan abrasi sangat penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Untuk membatasi efek berbahaya dari abrasi dan melindungi pantai sebagai sumber daya alam yang tak ternilai harganya dengan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan pemahaman secara menyeluruh mulai dari proses sampai dengan upaya untuk menghadapinya (Istijono, 2018; Cahyati, 2020; Arianti, 2018).

Pendekatan dalam penanganan yang berkelanjutan tersebut tentunya memerlukan keterlibatan perencanaan tata ruang pesisir, pengelolaan air yang baik, perlindungan pantai yang tepat, tindakan restorasi ekosistem pesisir, maupun partisipasi dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan mulai dari masyarakat, pemerintah, *non-government organization*, lembaga pendidikan, swasta, media serta lembaga lain yang berkepentingan dalam permasalahan ini guna mencapai hasil yang efektif dan berkesinambungan. Akan tetapi, dalam penanganan abrasi melalui pendekatan kolaborasi memiliki masalah utama yang akan dihadapi. Masalah tersebut di antaranya: (Istijono, 2018). Prioritas serta kepentingan yang berbeda pada setiap *stakeholder* dalam menghadapi abrasi di Kabupaten Bengkalis berbeda antar masing-masing *stakeholder*. (Fajrin, 2016). Kurangnya koordinasi antar *stakeholder* yang terkait dalam penanganan abrasi. (Purwanto, 2022). Kurangnya sumber daya finansial dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis. (Hamsah, 2022). Keterbatasan pengetahuan dan teknologi yang komprehensif dalam penanganan

abrasi. (5). Terdapat dominasi *stakeholder* dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimulai dari pendeskripsian terhadap gejala atau fenomena yang terjadi secara holistik dan kontekstual melalui pengumpulan data dan peneliti sebagai instrument kunci dalam penelitian ini. Ada beberapa argumen yang menjadi bahan pertimbangan mendasar dalam memilih serta menggunakan pendekatan kualitatif pada kajian yang dilaksanakan, yaitu diharapkan peneliti bisa memaparkan hasil secara menyeluruh dalam menganalisis suatu fenomena yang terjadi.

Pengumpulan data dengan melakukan observasi sumber baik melalui media maupun ke lapangan, wawancara kepada informan dan *key informan*, serta dokumentasi. Analisis data spiral dimulai dari pengumpulan data, pengelompokan data, membaca dan melakukan koding data, melakukan penjelasan serta mengklasifikasikan data dan interpretasi data. Tahap akhir dari proses analisis yaitu dengan melakukan visualisasi data.

Tahap awal yang dilakukan yaitu pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini dilakukan baik melalui media (berita online, media sosial, website resmi pemerintah) maupun dengan tahapan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dari berita *online* tersebut, ditentukan siapa yang akan menjadi informan maupun *key informan*. Teknik yang digunakan yaitu *snowball sampling*.

Tahap ke dua pengelompokan data, data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan dimensi yang ditetapkan dalam penelitian ini untuk mempermudah dalam menganalisis fenomena yang dibahas.

Tahap ke tiga yaitu membaca dan melakukan *coding* data, semua data yang diperoleh selanjutnya dibaca dan dilakukan pengkodean (*coding*) agar sesuai dengan agar tertata sesuai dengan tujuan dan tahapan.

Tahap ke empat melakukan penjelasan, mengklasifikasikan dan interpretasi data. Data yang diperoleh selanjutnya diberikan penjelasan, diklasifikasikan sesuai dimensi dan tujuan yang dibahas, serta dilakukan interpretasi terhadap semua permasalahan sesuai dengan tujuan pada latar belakang masalah serta teori yang digunakan. Tahap akhir yaitu dengan menganalisis data dan visualisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kebijakan atau menjalankan suatu program, pemerintah tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemampuan internal organisasinya. Keterbatasan kapasitas, sumber daya serta jaringan yang dimiliki oleh organisasi publik khususnya merupakan suatu tantangan dalam berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan. Berbagai kekurangan tersebut mendorong pemerintah melakukan kerjasama di berbagai pihak terutama di luar instansi publik (swasta) maupun masyarakat atau masyarakat yang tergabung dalam Afiliasi Sosial (NGO/LSM) sehingga mampu memberikan masukan, pandangan dalam proses pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan pemerintah (Purwanti, 2016).

Collaborative governance mulai digaungkan pada 1990-an. Prinsip utama dari *collaborative governance* yaitu kesamaan hak serta relasi diantara pejabat publik (pemangku kepentingan), sektor swasta serta masyarakat atas dasar konsensus (Cullen, 2000; Innes, 2004; Ansell, 2008). Konsensus atas dasar negosiasi antar lintas aktor dalam menyelesaikan isu yang terus berkembang menjadi satu kesatuan yang sangat representatif dalam pembahasan

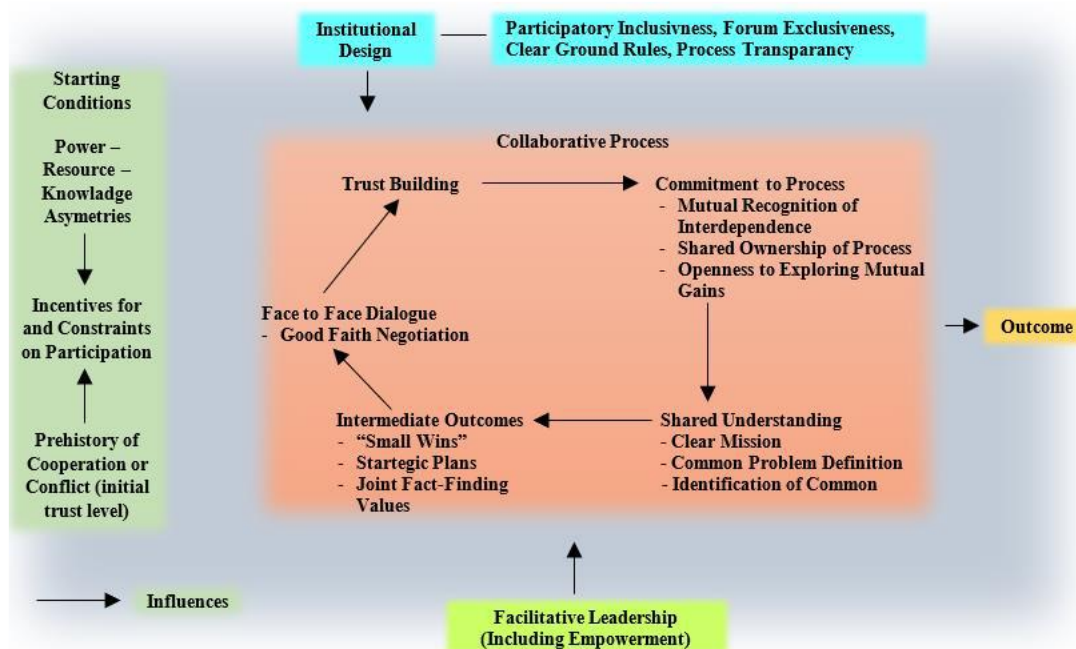
collaborative governance (Innes, 2004). *Collaborative governance* sebagai pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan aktor di luar pemerintahan pada tahapan pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus dan musyawarah serta bertujuan membuat, melaksanakan kebijakan publik, pengelolaan program atau aset publik (Ansell, 2008).

Collaborative governance merupakan proses yang di dalamnya melibatkan berbagai *stakeholder* yang terkait untuk mengungkap kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Hartman, 2002; Cordery, 2004). Pernyataan yang hampir sama disampaikan bahwa *collaborative governance* memerlukan adanya intensitas yang menunjuk sejauh mana kesetaraan hubungan yang terjadi diantara pihak yang berkolaborasi (Bingham, 2011). Menguatkan pandangan (Ansell, 2008), *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada *stakeholder* yang terdiri dari pemerintah atau lembaga di luar pemerintah, namun juga terbentuk atas adanya "*multipartner governance*" yang terdiri dari pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sipil atau yang terafiliasi dengan lembaga sosial yang terbangun atas sinergitas peran *stakeholder* dan penyusunan rencana yang bersifat *hybird* seperti halnya kerjasama *public-private & privat-social* (Lemos, 2007).

Selain itu (Emerson, 2012) *collaborative governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif yang berasal dari berbagai level, baik dalam tahapan pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja. Substansi dari *collaborative governance*

tidak hanya sebuah pengaturan yang beberapa lembaga dalam sebuah kepentingan akan tetapi pada proses yang bersifat transformatif serta berlaku dalam jangka panjang.

Menguatkan pandangan di atas, (Robertson, 2010) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses kolektif egalitarian, yang mana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap *stakeholder* memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Pandangan yang berbeda yang menyatakan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu sebuah proses yang bersifat transformatif mulai dari hubungan yang bersifat komando hingga interaksi yang bercirikan kolaborasi diantara pilar *governance* yang akan membentuk suatu kontinum dari hubungan informal sampai dengan formal (Shergold, 2008). Dengan penjelasan yang ada (Cullen, 2000; Cordery, 2004; Lemos, 2007; Wanna, 2008) definisi dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan karakteristik kerjasama antar lintas aktor baik dari pemerintah, lembaga di luar pemerintah maupun masyarakat sipil atau yang terafiliasi dengan lembaga sosial yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan dan diputuskan secara konsensus agar proses pencapaian kebijakan dapat terlaksana secara transformatif serta inovatif dengan harapan memperoleh hasil yang berkelanjutan. Adapun kerangka/model (Ansell, 2004) terdapat empat variabel diantaranya *starting conditions, institutional design, facilitative leadership and collaborative process*. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Model Collaborative Governance Ansell and Gash
(Sumber: Ansell and Gash, 2007)

Gambar di atas menjelaskan tentang empat tahapan yang ada dalam proses *collaborative governance*. Diawali dengan *starting conditions* merupakan awal dari beberapa lembaga melakukan kolaborasi. Diantaranya adanya kesenjangan kekuasaan, sumberdaya, pengetahuan, insentif dan pembatasan partisipasi. *Facilitative leadership* bertujuan melakukan mediasi serta memfasilitasi proses kolaborasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya pada *institutional design* menetapkan kebijakan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kolaborasi antar berbagai lembaga yang akan terlibat. *Collaborative process* merupakan proses mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen untuk proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Semua tata kelola kolaboratif dibentuk melalui dialog tatap muka di antara para pemangku kepentingan. Ditetapkan melalui konsensus, dialog sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan guna mengidentifikasi manfaat dan peluang bersama yang akan diperoleh.

Dalam tulisan ini, fokus utama yang menjadi sorotan adalah proses *collaborative governance* untuk mengurangi dampak abrasi di Kabupaten Bengkalis. Maka, bagian-bagian penting dalam tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, *Face to Face Dialogue*. Pada tahap awal, dibutuhkan komunikasi dan dialog antara para *stakeholder* yang akan terlibat dalam proses kolaborasi yang tujuan akhir dari kolaborasi ini konsensus (Ansell, 2008). Adapun tujuan utama dalam dialog yang akan dilaksanakan adalah untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, kelemahan serta keuntungan yang akan di dapat jika kolaborasi ini dilaksanakan. Dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis belum terjadi dialog tatap muka yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan selain dari Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat terdampak serta rekan-rekan mahasiswa dari perguruan tinggi dengan kepentingan dan mempunyai perhatian yang sama. Sedangkan dari pemerintah sulit diajak berkomunikasi dan koordinasi, hal ini juga tidak terlepas

dari ego sektoral yang masih ditunjukkan oleh lembaga pemerintah pada lembaga lain.

Kedua, *Trust Building*. Proses yang selanjutnya adalah membangun kepercayaan antar aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi (Ansell, 2008). Kepercayaan merupakan aspek awal dan paling menonjol dari proses kolaborasi. Temuan yang berkaitan dengan membangun kepercayaan antar *stakeholder* yang terjadi dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis hanya dari Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat terdampak serta rekan-rekan mahasiswa dari perguruan tinggi. Sehingga membangun kepercayaan antar lembaga di luar tiga lembaga tersebut tidak terjadi dalam penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis. Jika kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, maka kegiatan tersebut bukan atas dasar dari proses *collaborative governance* yang dicanangkan akan tetapi atas dasar tugas dan tanggung jawab pemerintah kepada warga, hal itupun selalu disampaikan bukan kewenangan dari lembaga yang seharusnya terlibat.

Ketiga, *Commitment to Process*. Peran komitmen merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam proses kolaborasi, agar sikap diantara *stakeholder* yang menganggap keberadaan mereka yang paling absolut, sehingga membutuhkan legitimasi dan komitmen bersama agar tercipta konsensus yang diinginkan (Ansell, 2008). Penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis memerlukan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya dari Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat terdampak maupun mahasiswa yang mewakili perguruan tinggi atas dasar kepentingan yang sama akan tetapi peran serta pemerintah sangat besar dalam penanggulangan permasalahan ini agar tidak menimbulkan dampak yang

semakin besar dan semakin kompleks jika tidak ditangi dengan segera.

Dalam kajian yang dilakukan ditemukan bahwa dari pemerintah sangat sulit untuk mendapatkan komitmen dalam penanganan abrasi, hal ini ditandai dengan absennya pihak pemerintah yang diundang oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam audiensi pada penanganan abrasi. Selain itu, sulit serta lamanya tanggapan dari pemerintah yang dilayangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut untuk bekerja bersama dalam penanganan permasalahan ini. Ditambah dengan penarikan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yang diambil alih oleh pusat dalam penanganan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan.

Keempat, *Shared Understanding*. Selanjutnya pemahaman bersama mengenai apa yang menjadi tujuan kolaborasi ini dilaksanakan. Beberapa istilah mengenai pemahaman bersama yaitu misi bersama, tujuan bersama, tujuan yang jelas, atau arah yang jelas (Ansell 2008). Dengan kata lain pemahaman bersama menyiratkan kesepakatan pada definisi masalah atau kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan mengenai permasalahan akan diselesaikan dalam proses kolaborasi. Pada kajian yang dilaksanakan untuk penanganan abrasi di Kabupaten Bengkalis itu hanya terjadi antara tiga (Purwanto, 2016) *stakeholder* yang mempunyai peran aktif dalam penanganan hal tersebut terutama dari unsur masyarakat terdampak pada abrasi. Selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat serta pencinta alam dari unsur mahasiswa pada perguruan tinggi setempat.

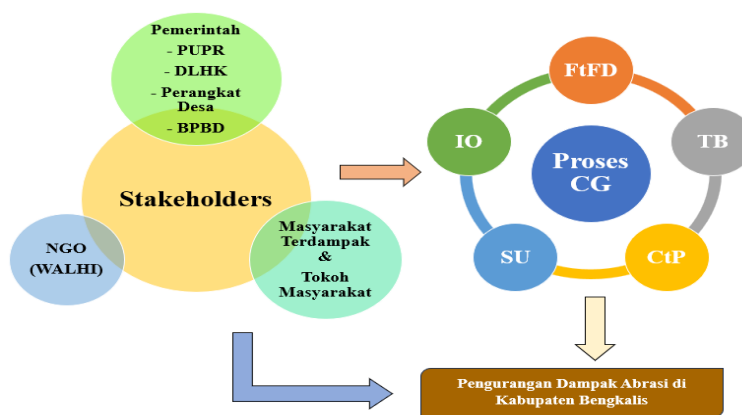
Kegiatan berbagi pemahaman ini dilaksanakan hanya pada beberapa unsur tersebut dikarenakan kesulitan dan adanya jenjang terutama ego sektoral dari lembaga pemerintah dalam penanganan ini sehingga kecenderungan dalam penanganan abrasi hanya pada beberapa *stakeholder*.

Kelima, *Intermediate Outcome*. Pada tahapan ini, *output* merupakan hasil dari proses yang dilaksanakan, dimana diperlukan capaian minimal sebagai indikator dari pencapaian hasil proses kolaborasi (Ansell, 2008). Capaian yang seharusnya diperoleh dalam penanganan ini adalah meminimalisir dampak yang terjadi dan potensi abrasi yang akan terjadi. Sehingga kerusakan alam serta ekosistem baik laut maupun darat dapat terpelihara dengan baik di kemudian hari. Akan tetapi dalam kajian yang dilaksanakan berkaitan penanganan abrasi masih belum menemukan titik maksimal dalam penanganan abrasi yang sudah terjadi dan pencegahan di masa yang akan datang dari potensi-potensi yang ada.

Model Pelaksanaan Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi di Kabupaten Bengkalis

Pada kajian yang telah dilaksanakan berkaitan dengan

penanganan abrasi ditinjau dari aspek proses *collaborative governance* maka belum dapat dikatakan bahwa proses penanganan abrasi sebagai bagian dari kerangka kerja yang bersifat kolaboratif, hal ini ditandai dengan lemahnya koordinasi baik dari lembaga di luar pemerintah ke pemerintah maupun dari masyarakat ke pemerintah. Selain itu tidak responsif pemerintah pada berbagai rancangan penanganan abrasi yang diinisiasi oleh lembaga di luar pemerintah, sehingga banyak kendala dalam proses pelaksanaan yang tidak dapat diselesaikan oleh hanya sebagian lembaga di luar pemerintah ditambah dengan penanganan abrasi yang membutuhkan pembiayaan yang tidak dapat dicover oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Berikut dapat digambarkan lembaga di luar pemerintah. Sehingga dalam kajian ini penulis mencoba merancang model proses *collaborative governance* untuk penanganan dampak abrasi di Kabupaten Bengkalis.



Gambar 2. Model Pelaksanaan Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi (Sumber: Olahan Penelitian, 2023)

SIMPULAN

Terdapat kepentingan yang berbeda pada setiap *stakeholder* dalam penanganan abrasi, koordinasi dilaksanakan pada saat kegiatan penanganan berlangsung bukan pada tahapan *face to face dialogue*, kesiapan dalam aspek finansial yang kurang

memadai dari daerah dalam penanganan abrasi, pemanfaatan teknologi yang masih belum memadai baik sebelum maupun sesudah abrasi, serta adanya dominasi *stakeholder* yakni masyarakat yang lebih dominan dalam penanganan karena adanya dampak langsung yang dirasakan oleh warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., Gash, A., (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18(4). 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arianti, D., Satlita, L. (2018). Collaborative Governance dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. *Jurnal Narapraja: Kajian Ilmi Administrasi Negara*. 6(2). <https://doi.org/10.21831/jnp.v6i2.24252>
- Bingham, L. B. (2011). *Collaborative Governance*. The SAGE Handbook of Governance. Berkeley,
- Cahyati, F. (2020). Analisis Tingkat Kerusakan Pantai Akibat Bencana Abrasi di Kabupaten Bengkalis. Skripsi. Thesis. Universitas Islam Riau Pekanbaru. Diakses dari: <https://repository.uir.ac.id/16192/1/133410789.pdf>
- Cordery, J. L. (2004). Another Case of the Emperor's New Clothes?. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*. 77(4). 481-484. <http://dx.doi.org/10.1348/0963179042596432>
- Creswell, J. W. (2007) *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publication. London
- Creswell, J. W. (2016). *Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi Keempat)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Cullen, F. T., Fisher, B. S., Applegate, B. K. (2000). Public Opinion about Punishment and Corrections. *Crime and Justice*. 27. 1-79. <http://dx.doi.org/10.1086/652198>
- Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 22(1). 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Eppel, E. (2013). *Collaborative Governance: Framing New Zealand Practice*. Institute for Governance and Policy Studies: A Research Institute of the School of Government. 1-55. Available from: <https://core.ac.uk/download/pdf/30677000.pdf>
- Ervianto, A., Hariyanto, B. (2021). Analisis Dampak Abrasi Pantai Terhadap Lingkungan Sosial di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. *Swara Bhumi*. 1(1). 1-8. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/38939>
- Fajrin, F. M., Muskananfolo, M. R., & Hendarto, B. (2016). Karakteristik Abrasi dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat di Pesisir Semarang Barat. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, 5(2), 43-50. <https://doi.org/10.14710/marj.v5i2.11645>
- Hamsah, H., Nirmala, N. (2022). Zonasi Bencana Abrasi Pantai Sappoang Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Geografi*. 9(2). 62-72. <https://doi.org/10.15294/jg.v19i2.34486>
- Hartman, C. L., Hofman, P. S., Stafford, E. R. S. T. (2002). Chapter 2 Potential and Limits. *Springer Link*. 8. 21-40.
- Innes, J. E., Booher, D. E. (2004). Reframing Public Participation: Strategies for The 21st Century. *Planning Theory and Practice*. 5(4). 419-436. <http://dx.doi.org/10.1080/1464935042000293170>

- Istijono B, Hakam A, Ophiyandri T. (2018). Investigation of The Effects of Plant Variety and Soil Sediment to the Coastal Abrasion in West Sumatra. *Geomate Journal*, 14(44), 52–57. Retrieved from <https://geomatejournal.com/geomate/article/view/1821>
- Lemos, M. C., Agrawal, A. (2007). A Greener Revolution in The Making?: Environmental Governance in the 21st Century. *Environment*. 49(5). 36–45. <http://dx.doi.org/10.3200/ENVT.49.5.36-45>
- Munandar, M, Kusumawati, I. (2017). Studi Analisis Faktor Penyebab dan Penanganan Abrasi Pantai di Wilayah Pesisir Aceh Barat. *Jurnal Perikanan Tropis*. 4(1). 47-56. <http://dx.doi.org/10.35308/jpt.v4i1>
- Purwanti, N. D. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-isu Kontemporer*. Gava Media. Yogyakarta
- Purwanto W, Haryanto DM, Priambada RI. (2020). Study of Abrasion in Pangkalan Jambi Village, Bengkalis District. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*. 3(1). 1–23. <https://doi.org/10.20961/shes.v3i1.45025>
- Robertson, P. J., Choi, T. (2010). Ecological Governance: Organizing Principles for an Emerging Era. *Public Administration Review*. 70(s1). s89–s99. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02250.x>
- Shergold, P. (2008). *Governing through Collaboration*. Collaborative Governance. 13-23. Available from: <http://dx.doi.org/10.22459/CG.12.2008.02>
- Wanna, J. (2008). *Collaborative Government: Meanings, Dimensions, Drivers and Outcomes*. Collaborative Governance. 3–11. Available from: <http://dx.doi.org/10.22459/CG.12.2008.01>
- Hardiyati, M., Apriani, F., Zulfiani, D. (2022). Penanggulangan Abrasi Pantai Biru Kersik Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Perspektif Collaborative Governanc. *eJournal Administrasi Publik*. 10(1). 5953-5964. [http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/10/eJurnal%20Mila%20Hardiyanti%2015020150589%20\(10-20-22-12-54-58\).pdf](http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/10/eJurnal%20Mila%20Hardiyanti%2015020150589%20(10-20-22-12-54-58).pdf)